



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INTAN PANDANWANGI B**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **732920**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 750.000.000**

1. Tanah Seluas 592 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN
Rp. 120.000.000
2. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN
Rp. 260.000.000
3. Tanah Seluas 290 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, LAINNYA Rp.
60.000.000
4. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN
Rp. 310.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 467.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
3. MOTOR, HONDA NF 125 TR M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA K1HO2N14LO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. ----****D. SURAT BERTHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 270.976.412****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 1.487.976.412**



III. HUTANG

Rp. 121.330.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.366.646.412

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.